**REFORMASI ADMINISTRASI PADA BIDANG PENDIDIKAN**

**KABUPATEN KUTAI TIMUR**

**Musdalifa**

13.11.1001. 3509 141

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan ini untuk (1) mengetahui proses reformasi administrasi pada bidang pendidikan di Kabupaten Kutai Timur. (2) mengetahui pencapaian tujuan reformasi administrasi pada bidang pendidikan di Kabupaten Kutai Timur. Metode penelitian yang digunakan yaitu motode kualitatif dengan melakukan pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Proses analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Penekanan terhadap program lebih diprioritaskan perbaikan sumberdaya manusia terutama guru-guru dengan penerapan kurikulum K-13 secara menyeluruh dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia melalui penyekolaan guru-guru yang belum memenuhi kualifikasi S1. Kemudian berarnya perhatian dan partisipasi komite dalam memantau manajemen sekolah. Selanjutnya adanya perbaikan dalam hal sarana prasarana pendidikan, adanya gaya kepemimpinan yang senantiasa memantau atau memonitoring secara terus-menerus program pendidikan, serta adannya aturan formal masih diterapkan dengan tepat seperti calon kepala sekolah yang harus memenuhi kriteria dan melalui tes sebelum mengikuti diklat kepala sekolah selain itu birokrasi menandakan kuatnya pendekatan legalistik dengan adanya petunjuk teknis dan pelaksanaan dari pemerintah pusat.(2) Bergesernya mindset pegawai yang didasarkan pada pelayanan yang berikan kepada masyarakat merupakan temuan pada aspek penyempurnaan tatanan, kemudian pada aspek peyempurnaan metode ditemukan uraian kegiatan beserta rincian tugas masing-masing, dimana terdapat satuan hasil kerja dengan pembagian yang berbeda yaitu dokumen, kegiatan, dan laporan. Kemudian adanya dorongan penguasaan aplikasi online untuk membantu proses administrasi selain itu adanya fungsi monitoring yang dilakukan pimpinan merupakan serangkaian temuan dalam penelitian ini.

Kata Kunci : Reformasi Administrasi, Pendidikan.

***Administrative Reforms In Education***

***East Kutai Regency***

**Musdalifa**

13.11.1001. 3509 141

**Abstract**

This study aims to (1) know the process of administrative reform in the field of education in East Kutai Regency. (2) To know the achievement of administrative reform objectives in the field of education in East Kutai Regency. The research method used is qualitative method by collecting data obtained through observation, interview, and documentation. The process of data analysis includes data reduction, data presentation, and conclusion. The results of the research indicate that: (1) Emphasis on the program is prioritized in improving human resources, especially teachers with the application of the K-13 curriculum as a whole and capacity building of human resources through the management of teachers who have not met the S1 qualification. Then the attention and participation of the committee in monitoring the school management. Furthermore, there are improvements in educational infrastructure facilities, a leadership style that constantly monitors or continuously monitors education programs, and the role of formal rules is still applied appropriately as candidates for principals who must meet the criteria and through tests before attending the training of the principal. The bureaucracy signifies the strong legalistic approach with the technical guidance and implementation of the central government (2) The shift in the mindset of employees based on the services provided to the community is a finding on the aspect of the improvement of the order, then on the aspect of the method improvement found the description of the activity along with the details of each task, Where there are units of work with different divisions of documents, activities, and reports. Then there is the impetus mastery of online applications to assist administrative processes in addition to the existence of monitoring functions conducted by the leadership is a series of findings in this study.

Keywords: *Administrative Reform, Education.*

**PENDAHULUAN**

Pendidikan merupakan barang dan jasa milik umum(publik), yang mana masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaranhal ini tertuang dalam pasal 31 UUD 1945, dan pendidikan merupakan kewajiban pemerintah untuk melaksanakannya,utamanya peranan mendasar menyediakan kesempatan belajar. Oleh karena pendidikan merupakan *public goods*, maka sudah semestinya kajian tentang pendidikan masuk dalam perspektif administrasi public.

Adapun kebijakan publik di bidang pendidikan dapat didefinisikan sebagai keputusan yang diambil bersama antara pemerintah dan aktor di luar pemerintah dan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhinya untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan pada bidang pendidikan bagi seluruh warga masyarakat. Kebijakan publik bidang pendidikan meliputi anggaran pendidikan, kurikulum, rekrutmen tenaga kependidikan, pengembangan profesional staf, tanah dan bangunan, pengelolaan sumber daya, dan kebijakan lain yang bersentuhan langsung maupun tidak langsung atas pendidikan (Solichin, 2015).

Sejumlah kritik dan koreksi terhadap praktek pendidikan nasional dalam (Supardi, 2013), pertama, ciri pendidikan nasional yang seharusnya didasarkan pada kebudayaan nasional kerap terabaikan. Pembentukan watak tidak lagi menjadi prioritas. Pendidikan hanya sibuk untuk membentuk anak-anak yang menang pada olimpiade-olimpiade saja, hanya membentuk intelektual dan kognisi saja. Kedua, poskolonialisme sangat kental dalam praktek pendidikan nasional dewasa ini, yaitu ditandai dengan munculnya kelompok-kelompok (kelas-kelas) dalam pendidikan. Ketiga, adanya nuansa pembohongan publik yang diumbar melalui iklan dan jargon sekolah gratis keempat, perguruan tinggi tidak lagi berkembang sebagai pusat pengembangan kebudayaan nasional, tetapi hanya sebagi pusat pelatihan. Kelima, konsep world class education dan manajemen pendidikan nasional menjadi kabur, karena bukan berorientasi pada kebutuhan anak Indonesia, melainkan sekadar untuk membentuk anak mampu bersaing.

Selain itu dalam persoalan pendanaan pendidikan juga ditemui berbagai kendala seperti dalam prioritas utama penggunaan dana BOS adalah untuk kegiatan operasional sekolah bagi sekolah yang telah menerima DAK, tidak diperkenankan menggunakan dana BOS untuk peruntukan yang sama. Dana BOS dalam pembelanjaannya harus sesuai dengan juknis BOS 2013 yang didalamnya ada 13 item pembelanjaan, akan tetapi tidak semua biaya operasional satuan pendidikan dapat dibiayai oleh BOS seperti misalnya: pembelian LKS, kegiatan pentas seni siswa di akhir tahun pelajaran, dan kegiatan perayaan hari besar keagamaan (Muryati, 2016).

Selain itu dalam skala daerah problematika pendidikan yang tidak dapat dilepaskan yaitu dari segi sarana dan prasarana. Kebanyakan sekolah dinilai kekurangan sarana untuk mendukung kelengkapan pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Hal ini terutama dialami oleh sekolah yang berada di daerah terpencil dan sekolah-sekolah yang memiliki masalah kesulitan dana. Masalah tersebut sangat mempengaruhi pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, dan pelaksanaan pembelajaran di sekolah-sekolah. Persoalan pemerataan pendidikan, dapat dipahami dengan adanya kondisi penduduk usia sekolah di daerah 3T yaitu daerah Terdepan, Terpencil dan Tertinggal. Sebagaimana dijelaskan (Kemendikbud, 2013) Beberapa permasalahan penyelenggaraan pendidikan di daerah-daerah ini antara lain karena kurangnya persediaan tenaga pendidik, distribusi tidak seimbang, insentif rendah, kualifikasi dibawah standar, guru-guru yang kurang kompeten, serta ketidaksesuaian antara kualifikasi pendidikan dengan bidang yang ditempuh, penerapan kurikulum di sekolah belum sesuai dengan mekanisme dan proses yang distandarkan. Disamping itu, permasalahan angka putus sekolah juga masih relatif tinggi menimbulkan persoalan lain.

Melihat rangkaian fenomena yang telah digambarkan baik dalam skala nasional maupun daerah memerlukan reformasi adminstrasi pada bidang pendidikan dengan memperhatikan sejumlah agenda salah satunya yaitu tema pembangunan pendidikan jangka panjang mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025.

Penelitian reformasi administrasi yang terjadi di Kabupaten Kutai Timur menjadi menarik setelah melihat sejumlah kebijakan pendidikan yang diterapkan di Kabupaten Kutai Timur dalam kurun setahun terakhir. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menerapkan pembebasan biaya pendidikan dari SD hingga perguruan tinggi, termasuk pungutan uang gedung, dan biaya ujian. Selain itu, pemkab juga memberikan insentif tambahan bagi tenaga pendidik hingga Rp 1,5 juta. Hal Ini terkait dengan perhatian pemerintah daerah Kabupaten Kutai Timur agar tuntutan anggaran sebesar 20% dari APBD terpenuhi, dan juga APBN terpenuhi secara riil.

Subtansi reformasi administrasi dalam penelitian ini lebih di fokuskan untuk menjawab proses reformasi administrasi pada bidang pendidikan dan mengetahui pencapaian tujuan reformasi administrasi pada bidang pendidikan di Kabupaten Kutai Timur.

**KERANGKA KONSEP DAN TEORI**

**Konsep Reformasi Administrasi**

Reformasi diartikan sebagai proses perubahan dari kondisi lama menuju kondisi baru yang dikehendaki (Abidin, 2006). Sedarmayanti (2009) kemudian mengungkapkan bahwa reformasi merupakan proses upaya sistematis, terpadu, konferensif, ditujukan untuk merealisasikan tata pemerintahan yang baik (Good Governance). Caiden (1991) mendefinisikan reformasi administrasi sebagai *‘the artificial inducement of administrative transformation againts resistance*’. Definisi Caiden ini mengandung beberapa implikasi (1) Reformasi administrasi merupakan kegiatan yang dibuat oleh manusia (manmade), tidak bersifat eksidental, otomatis maupun alamiah; (2) Reformasi administrasi merupakan suatu proses. (3) Resistensi beriringan dengan proses reformasi administrasi.

Reformasi administrasi menurut Hahn Been Lee dan Samontedalam Nasucha (2004), merupakan perubahan atau inovasi secara sengajadibuat dan diterapkan sebagai suatu agen perubahan sosial untuk menjamin persamaan politik, keadaan sosial dan pertumbuhan ekonomi lebih efektif. Zauhar (2007) mengartikan reformasi administrasi adalah suatu usaha sadar dan teren-cana untuk mengubah struktur dan prosedur biro-krasi (aspek reorganisasi atau institutional /ke-lembagaan, sikap dan perilaku birokrat), (aspek perilaku, guna meningkatkan efektifitas organi-sasi atau terciptanya administrasi yang sehat dan menjamin tercapainya tujuan pembangunan nasional). Sementara Khan (2001) mengartikan, sebagai usaha-usaha yang memacu atau membawa perubahan besar dalam sistem birokrasi negara yang dimaksudkan untuk mentransformasikan praktik, perilaku, dan struktur yang telah ada sebelumnya.

Reformasi administrasi negara merupakan bagian yang sangat penting dalam pembangunan negara. Reformasi administrasi negara terjadi karena perubahan dan modernisasi administrasi negara tidak berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan tuntutan keadaan, karenanya diperlukan usaha yang sadar dan terencana untuk mengubah struktur dan prosedur birokrasi, meningkatkan efektifitas organisasi sehingga dapat diciptakan administrasi negara yang sehat dan terciptanya tujuan pembangunan nasional. Dalam masa transisi (seperti Indonesia) sebaiknya reformasi administrasi negara diawali dengan reformasi prosedur untuk memperbaiki sistem baru diikuti dengan peleturan struktur organisasi, teknik, dan metoda serta modifikasi-modifikasi sesuai dengan kondisi lingkungan, sedangkan reformasi kinerja biasanya harus direkayasa melalui program-program pemberdayaan yang sesuai dengan kebutuhan. “Terdapat tipe reformasi administrasi negara, terutama di negara-negara berkembang, antara lain : perubahan kelembagaan, perubahan sistem manajemen, peningkatan profesionalisme SDM, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan penerapan prinsip desentralisasi ( Ibrahim, 2009).

**Tujuan Reformasi Administrasi**

Secara umum tujuan reformasi administrasi publik diklasifikasikan ke dalam 6 kelompok, 3 bersifat intraadministrasi yang ditujukan untuk menyempurnakan administrasi internal, dan 3 lagi berkenaan dengan peran masyarakat di dalam system administrasi. Tiga tujuan internal reformasi administrasi publik (Hendrayady, 2011) adalah sebagai berikut : (1) Efisiensi administrasi, dalam arti penghematan uang, yang dapat dicapai melalui penyederhanaan formulir, perubahan prosedur, penghitungan duplikasi dan kegiatan organisasi metode yang lain. (2) Penghapusan kelemahan atau penyakit administrasi seperti korupsi, pilih kasih dan sistem teman dalam sistem politik dan lain-lain. (3) Pengenalan dan penggalakan sistem merit, pemakaian PPBS, pemrosesan data melalui sistem informasi yang otomatis, peningkatan penggunaan pengetahuan ilmiah dan lain-lain.

Sedangkan Hahn Been Lee dalam (Zauhar, 2007) berpendapat bahwa terdapat tiga tujuan dilakukannya reformasi administasi antara lain (1) Penyempurnaan Tatanan (improved order) (2) Penyempurnaan Metode (improved method) (3) Penyempurnaan Kinerja (improved permormance).

**Strategi dan Pengukuran Reformasi Aministrasi**

Adapun Strategi reformasi terhadap administrasi reformasi menurut Abidin (2006) dapat dilakukan melalui (1) peningkatan kemampuan birokrasi agar mampu mewujudkan kebijakan-kebijakan yang normatif menjadi kenyataan di lapangan. Hal ini dapat dilakukan melalui perbaikan institusi publik, perbaikan prosedur pelayanan dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia aparatur. (2) perbaikan prosedur dan tata laksana pengelolaan kekayaan negara dengan mendahulukan kepentingan publik, keselamatan kekayaan negara dan kebenaran secara hukum. (3) penetapan pejabat publik melalui kriteria dan prosedur terbuka dengan menempatkan persyaratan ketaatan, kejujuran dan keahlian sebagai syarat pokok.

Selain itu Osborne dalam (Puspitasari dkk, 2014), menyatakan ada 5 strategi reformasi administrasi yaitu strategi Inti, Strategi Konsekuensi, Strategi Pelanggan, Strategi Kontrol, dan Strategi Budaya.

Eastern Regional Organization for Public Administration (EROPA), menyepakati bahwa reformasi administrasi meliputi perbaikan struktur administrasi (kelembagaan) dan perilaku orang yang terlibat didalamnya. Dikemukakan lima alat pengukur reformasi administrasi (Lee dan Samonte, 1970), yaitu (1) Penekanan baru terhadap program (2) perubahan sikap dan perilaku masyarakat dan anggota birokrasi (3) Perubahan gaya kepemimpinan yang mengarah kepada komunikasi terbuka dan manajemen partisipatif; (4) Penggunaan sumberdaya yang lebih efisien dan (5) Pengurangan penggunaan pendekatan legalistic.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan alasan bahwa temuan-temuan dalam penelitian kualitatif tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara *holistik* (utuh) dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. (Moleong, 2012). Adapun Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah fenomenologi.

Untuk mendapat data yang tepat maka perlu ditentukan informan yang memiliki kompetensi dan sesuai dengan kebutuhan data. Adapun subyek penelitian terdiri sejumlah Kepala Bidang dan Kepala Seksi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur dan juga tokoh masyarakat pemerhati pendidikan di Kabupaten Kutai Timur.Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

**HASIL PENELITIAN**

1. **Reformasi Administrasi Pada Bidang Pendidikan Di Kabupaten Kutai Timur**

Penelitian ini menfokuskan pada proses reformasi administrasi pada bidang pendidikan (khusunya pendidikan dasar) di Kabupaten kutai timur yang secara khusus mengacu pada indikator reformasi administrasi yaitu penekanan baru terhadap program, perubahan sikap dan perilaku masyarakat dan anggota birokrasi, perubahan gaya kepemimpinan yang mengarah kepada komunikasi terbuka dan manajemen partisipatif, penggunaan sumberdaya yang lebih efisien, dan pengurangan penggunaan pendekatan legalistik.Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan pada indikator berikut:

**Penekanan Baru Terhadap Program**

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa bagian dari penekanan program yang penulis indentifikasi adalah perbaikan sumberdaya manusia terutama guru-guru dengan penerapan kurikulum K-13 secara menyeluruh, kemudian peningkatan kapasitas sumberdaya manusia melalui penyekolaan guru-guru yang belum memenuhi kualifikasi S1 agar dapat meningkatkan mutu pendidikan dengan mengutamakan kualitas pengajar.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa penekanan pada program berada pada peningkatan kualitas pengajar di Kabupaten Kutai Timur yaitu kualitas pendidikan tenaga pendidik, kemudian sertifikasi guru serta diklat peningkatan wawasan tenaga pendidik.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa penekanan pengendalian mutu pendidikan terutama mengarah pada penerapan kurikulum K-13 yang dibarengi dengan langkah percepatan akreditasi sekolah yang bertujuan untuk peningkatan mutu pendidikan karena didalamnya terakomodir 8 standar pendidikan.

Dari keseluruhan hasil penelusuran wawancara dapat disimpulkan bahwa perbaikan sumberdaya manusia terutama guru-guru melalui peningkatan kapasitas sumberdaya manusia seperti penyekolaan guru-guru yang belum memenuhi kualifikasi S1 dan pemenuhan sertifikasi bagi para guru.

**Perubahan sikap dan perilaku masyarakat dan anggota birokrasi**

Untuk memperoleh penjelasan mendalam pada indikator ini maka perlu ditinjau dari sudut pandang penerima kebijakan yaitu masyarakat terikait*impact* atau dampak yang mereka rasakan terkait perubahan yang dilakukan melalui reformasi administrasi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa masyarakat pemerhati pendidikan di Kabupaten Kutai Timur melihat kemajuan program dinas pendidikan yang ditandai dengan tingginya tingkat partisipasi komite dalam memantau manajemen sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diperoleh pemahaman bahwa terjadi perubahan pandangan dari masyarakat yaitu melihat adanya perbaikan dalam hal sarana prasarana pendidikan yang menunjang mutu pendidikan disamping itu peningkatan kompetensi guru menunjukkan adanya perubahan kearah kualitas pendidikan yang lebih baik. Selain itu masyarakat juga melihat kemajuan dalam hal partisipasi masyarakat dengan keterlibatan pada komite sekolah yang berfungsi sebagai kontrol kualitas pendidikan sekolah dasar di Kabupaten Kutai Timur.

**Perubahan gaya kepemimpinan**

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa perubahan gaya kepemimpinan yang merupakan salah satu indikator reformasi adminstrasi pendidikan menunjukkan sejumlah hal yang menarik untuk dicermati dimana aspek kedisiplinan memberikan stimulus pada perbaikan manajemen pendidikan dalam lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur.

Hal lain yang dapat dicermati yaitu keberadaan pemimpin yang memantau atau memonitoring secara terus menerus program Dinas pendidikan Kabupaten Kutai timur dalam meningkatkan mutu pendidikan selain itu sering dilakukan rapat koordinasi agar menjaga pelaksanaan program berjalan efektif hal ini juga didukung dengan sikap pimpinan yang terbuka terhadap masukan pegawai dalam rangka menjalankan program yang bertujuan untuk peningkatkan mutu pendidikan.

**Penggunaan Sumberdaya Yang Lebih Efisien**

Dari data peneluran dokumen dapat diketahui bahwa jumlah guru untuk SD/MI dan SDLB yakni 2.346 yang tersebar pada 18 kecamatan, sementara untuk jumlah sumberdaya pengajar pada tingkatan SMP/MTS berjumlah 993 orang yang tersebar pada 18 kecamatan di Kabupaten Kutai Timur.

Berdasarkan penelusuran data dokumen dapat diketahui bahwa secara keseluruhan sarana prasarana pendidikan dasar telah terpenuhi kelayakan untuk penggunaannya namun masih terdapat sejumlah hal yang belum tuntas 100 % seperti perabotan perpustakaanketersediaan peralatan multimedia masih belum terpenuhi, peralatan pendidikan di laboratorium, sarana ruang jamban, dan Kelengkapan sarana ruang UKS.

Berdasarkan hasil wawancara dan data dokumen yang telah ditelusuri sebelumnya dapat diperoleh pemahaman bahwa penggunaan sumber daya yang efektif dalam peningkatan mutu pendidikan di kabupaten kutai berjalan cukup efektif hal ini dicermati dari sejumlah Sumberdaya Guru pendidikan dasar yang telah didominasi oleh pendidik berkualifikasi S1. Kemudian sarana prasarana pendidikan dasar di Kabupaten Kutai Timur telah terpenuhi secara keseluruhan walaupun ada sejumlah komponen seperti perabotan perpustakaan, peralatan pendidikan di laboratorium, sarana ruang jamban, dan Kelengkapan sarana ruang UKS yang masih perlu dilengkapi agar semakin memberikan suasana yang kondusif untuk kegiatan belajar mengajar di Kabupaten Kutai timur khususnya pendidikan dasar.

**Pengurangan Penggunaan Pendekatan Legalistik**

Berdasarkah hasil wawancara dapat diketahui bahwa ada aspek formal yang berlaku dimana dalam pemilihan kepala sekolah ada tes yang dilalui dalam pesyaratan seorang guru menjadi kepala sekolah dan mengikuti pedidikan dan pelatihan kepala sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa pendekatan legalistik masih tetap diterapkan pada dinas pendidikan kabupaten Kutai Timur hal merujuk pada pendoman yang diturunkan dari pemerintah pusat terkait dengan petunjuk teknis dan pelaksanaan suatu penggunaan anggaran seperti Dana Alokasi Khusus sektor pendidikan. Kondisi ini memiliki kelemahan yaitu lambatnya birokrasi dalam melaksanakan programnnya karena anggaran seperti DAK memerlukan petunjuk teknis dari pemerintah pusat.

1. **Pencapaian Tujuan Reformasi Administrasi**

Untuk mengetahui pencapaian tujuan reformasi administrasi pada bidang pendidikan (khususnya Pendidikan dasar) di Kabupaten Kutai Timur maka penelitian ini mengacu pada indikator penyempurnaan Tatanan (*improved order*), penyempurnaan Metode (*improved method*) dan Penyempurnaan Kinerja (*improved permormance*). Agar memperoleh dapat memperoleh gambaran secara mendalam maka dapat diuraikan sebagai berikut:

**Penyempurnaan Tatanan**

Berdasarkan hasil wawancara dapat diperoleh gambaran bahwa penyempurnaan tatanan dimulai dari pegawai yang mesti bekerja dengan tugas pokok dan fungsi yang berikan selain itu kedisiplinan menjadi hal yang penting dalam aktifitas keseharian pegawai.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa tatanan dalam birokrasi yang baik yaitu mampu merubah mindset pegawai yang kaku hanya mengacu pada perintah dan arahan namun saat ini orientasi didasarkan pada pelayanan yang berikan kepada masyarakat.

**Penyempurnaan Metode**

Berdasarkan data penelusuran dokumen dapat diketahui bahwa terdapat uraian kegiatan yang dibagikan pada seksi pengendalian mutu Pendidikan Dasar Kabupaten Kutai Timur. Pada uraian kegiatan tersebut dijabarkan rincian tugas masing-masing, hal yang membedakan adalah satuan hasil kerja yang dihasilkan dimana terdapat pembagian hasil yang berbeda yaitu dokumen, kegiatan, dan laporan dengan waktu kerja yang efektif yakni 72000 detik setiap hari kerja.

Hal ini menunjukkan bahwa pembagian hasil kerja dengan cari ini merupakan salahsatu penyempurnaan metode dalam mengefektifkan kerja agar tidak terjadi tumpang tindih tupoksi masing-masing individu didalam unit organisasi beserta hasil kerja yang dapat diukur berdasarkan indikator laporan, dokumen dan kegiatan.

**Penyempurnaan Kinerja**

Berdasarkan hasil wawancara dapat diperoleh pemahaman bahwa penyempurnaan kinerja dengan manfaatkan teknologi yaitu penggunaan aplikasi online untuk database pendidikan dan administrasi.

Berdasarkan hasil wawancara juga dapat diketahui bahwa penyempurnaan kinerja dilakukan dengan fungsi monitoring oleh pimpinan terhadap kegiatan atau program yang sedang dilaksanakan. Pada aspek penyempurnaan kinerja ini dapat diperoleh pemahaman bahwa penyempurnaan kinerja pegawai dinas pendidikan kabupaten Kutai timur khususnya dalam hal peningkatan mutu pendidikan memerlukan penguasaan aplikasi yang terkoneksi secara online disamping itu fungsi monitoring yang dilakukan pimpinan dilakukan untuk menjaga kinerja pegawai tetap maksimal dan menjalankan tugas sesuai tugas pokok dan fungsinya.

**PENUTUP**

**Kesimpulan**

Penekanan terhadap program lebih diprioritaskan perbaikan sumberdaya manusia terutama guru-guru dengan penerapan kurikulum K-13 secara menyeluruh, kemudian peningkatan kapasitas sumberdaya manusia melalui penyekolaan guru-guru yang belum memenuhi kualifikasi S1. adanya gaya kepemimpinan yang senantiasa memantau atau memonitoring secara terus menerus program pendidikan, selain itu birokrasi memberikan gambran mengenai kuatnya pendekatan legalistik dengan adanya petunjuk teknis dan pelaksanaan dari pemerintah pusat. Semetara pencapaian tujuan reformasi administrasi dapat digambarkan dengan bergesernya mindset pegawai yang didasarkan pada pelayanan yang berikan kepada masyarakat, serta adanya fungsi monitoring yang dilakukan pimpinan dalam menjaga kinerja pegawai agar berada dalam tupoksinya merupakan temuan pada aspek penyempurnaan kinerja.

**Saran**

Perlu percepatan dalam pemenuhan sarana prasarana penunjang seperti perabotan perpustakaan, ketersediaan peralatan multimedia, peralatan pendidikan di laboratorium, sarana ruang jamban, dan kelengkapan sarana ruang UKS. Selain itu teknologi dan aplikasi terbaru perlu diupdate dan dikuasai oleh pegawai yang berurusan dengan data-data teknis agar urusan administrasi dapat memberikan dampak pada efektivitas dan efesiensi kerja.

**DAFTAR PUSTAKA**

Abidin Said Zainal, 2006, *Dinamika Reformasi dan Revitalisasi di Indonesia.* Jakarta: Suara Bebas.

Caiden G. E. 1991. *Administrative Reform Comes Age*, New York, N.Y. de Gruyter.

Hendrayady,Agus. 2011. *Reformasi Administrasi Publik*. Jurnal Fisip Umrah Vol. I, No. 1, : 107-113

Ibrahim, Amin. 2009. *Pokok-Pokok Administrasi Publik & Implementasinya.* Bandung: Refika Aditama.

Kemendikbud. 2013. *Model Diklat Guru Dalam Rangka Implementasi Kurikulum 2013*.

Khan, Mohammad Mohabbat. 2001. *Problem of Democracy: Administrative Reform and Corruption*. The paper was presented at the Norwegian Association for Development Research Annual Conference on The State.

Lee, Hahn Been & Samonte, Abelardo G, ed. (1970). *Administrative Reform In Asia*, Manila: The EROPA.

Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi penelitian kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Muryati, Irene. 2016. *Pengelolaan Dana Bos Pada Sd Negeri Di Upt Pelayanan Pendidikan Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman.* Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan Volume 4, No 2.

Nasucha, Chaizi. 2004. *Reformasi Administrasi Publik*. Jakarta: PT. Grasindo

Puspitasari, Dian. dkk.2014. *Reformasi Administrasi Pelayanan Publik Pada Kantor Pelayanan Terpadu (Studi Pada Disperindag Dan Dispendukcapil Kota Malang)*. Jurnal Administrasi Publik (Jap), Vol. 2, No. 2, Hal. 338-343

Sedarmayanti. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. PT. Bandung : Refika Aditama.

Solichin, Mujianto. 2015. *Implementasi Kebijakan Pendidikan Dan Peran Birokrasi.* Jurnal Studi Islam Volume 6, Nomor 2.

Supardi, U.S. 2013*. Arah Pendidikan Di Indonesia Dalam Tataran Kebijakan Dan Implementasi*. Jurnal Formatif 2Nomor 2: 111-121

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025*.

Zauhar, Soesilo.2007. *Reformasi Administrasi, Konsep, Dimensi, dan Strateg*i. Jakarta: PT. Bumi Aksara